



## **Warga Nahdliyin, Partai Politik, dan Pilihan Presiden 2024: Antara Identitas Keagamaan, Jaringan Organisasi, dan Preferensi Elektoral**

### **Burhanuddin Muhtadi**

Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan Visiting Senior Fellow ISEAS - Yusof Ishak Institute, Singapura

Email: [burhanuddin.muhtadi@uinjkt.ac.id](mailto:burhanuddin.muhtadi@uinjkt.ac.id)

### **M. Adam Kamil**

Direktur Riset Indikator Politik Indonesia

Email: [adamkamil@indikator.co.id](mailto:adamkamil@indikator.co.id)

### **Abstrak**

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan kerap diasumsikan sebagai basis elektoral yang kohesif. Namun, Pemilu 2024 kembali menunjukkan bahwa besarnya jumlah warga Nahdliyin tidak otomatis berujung pada konsolidasi elektoral. Artikel ini menganalisis bagaimana identitas keagamaan dan keterikatan organisasional NU memengaruhi pilihan partai politik dan kandidat presiden dalam Pemilu 2024. Studi ini menggunakan data survei nasional berskala besar (N = 5.500) yang dilengkapi dengan survei masif di dua basis utama NU—Jawa Timur dan Jawa Tengah (N ≈ 20.900). Secara analitis, studi ini membedakan antara kedekatan kultural dengan NU dan keanggotaan aktif dalam organisasi NU, serta menguji pengaruh keduanya melalui analisis deskriptif dan regresi multivariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh NU tidak bersifat monolitik. Kedekatan kultural dengan NU masih berperan dalam membentuk pilihan partai—terutama terhadap PKB dan PPP—namun efeknya terbatas dan cenderung melemah setelah dikontrol oleh faktor demografis dan evaluasi politik. Sebaliknya, keanggotaan aktif dalam NU memiliki efek elektoral yang jauh lebih kuat dan konsisten, baik dalam pilihan partai maupun kandidat presiden. Temuan ini menjembatani perdebatan keras antara pendekatan politik aliran dan dealiranisasi dengan menunjukkan bahwa afiliasi keagamaan tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini bekerja secara kondisional melalui jaringan organisasi dan isyarat elite yang terfragmentasi.

**Keywords:** Identitas Keagamaan; Perilaku Memilih; Keterikatan Organisasional

### **Abstract**

---

*Nahdlatul Ulama (NU) is the largest Islamic organisation in Indonesia and is often assumed to constitute a cohesive electoral base. However, the 2024 election once again demonstrated that the numerical strength of Nahdliyin does not automatically translate into electoral consolidation. This article analyses how religious identity and organisational attachment to NU shaped voters' choices of political parties and presidential candidates in the 2024 election. The study draws on a large-scale national survey (N = 5,500), supplemented by extensive surveys in two of NU's main strongholds, East Java and Central Java (N = 20,900). Analytically, the study distinguishes between cultural affinity with NU and active membership in NU organisations, and examines the effects of both through descriptive analysis and multivariate regression. The findings show that NU's electoral influence is not monolithic. Cultural affinity with NU continues to shape party choice, particularly support for PKB and PPP, but its effect is limited and tends to weaken after controlling for demographic factors and political evaluations. By contrast, active in NU has a much stronger and more consistent electoral effect, both on party choice and on presidential candidate preference. These findings bridge the intense debate between the politik aliran and dealignment perspectives by showing that religious affiliation has not disappeared altogether. Rather, it now operates conditionally through organisational networks and fragmented elite cues.*

*Keywords: Religious Identity; Voting Behaviour; Organisational Attachment.*

### **Pendahuluan**

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan basis massa yang sangat luas, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sejak Reformasi 1998, NU kerap dipandang sebagai aktor kunci dalam politik elektoral Indonesia. Namun, besarnya jumlah warga NU tidak serta-merta berbanding lurus dengan konsolidasi suara politik mereka pada satu partai atau satu kandidat presiden. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan klasik namun terus relevan: mengapa warga NU—meskipun jumlahnya besar—tidak otomatis memilih partai yang diasosiasikan secara kuat dengan NU, khususnya PKB?

Pemilu serentak 2024 kembali menegaskan kompleksitas ini. Di satu sisi, PKB tetap menjadi aktor penting dalam politik nasional dan secara historis memiliki hubungan dekat dengan NU. Di sisi lain, preferensi elektoral warga NU dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tampak semakin terfragmentasi, seiring dengan menguatnya personalisasi politik, kalkulasi kinerja, serta dinamika elite dan koalisi. Studi ini berangkat dari upaya untuk memahami bagaimana kedekatan warga dengan NU, baik secara kultural maupun organisasional, mempengaruhi pilihan politik mereka dalam Pemilu Legislatif dan Presiden 2024.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data survei berskala besar yang dikombinasikan dengan analisis inferensial, kami menguji pengaruh NU terhadap perilaku memilih di Pemilu 2024. Kami menemukan bahwa pengaruh NU dalam politik elektoral Indonesia tidak bersifat monolitik maupun otomatis. Tidak seperti klaim kubu yang menegaskan politik aliran sudah mati, kami menemukan efek NU tetap relevan secara elektoral, meski pengaruhnya kini bekerja secara kondisional dan berlapis, terutama melalui jaringan organisasional dan isyarat elite, bukan semata-mata melalui identitas kultural keagamaan. Dengan membedakan antara warga yang “merasa NU” dan mereka yang aktif secara organisasional, studi ini menunjukkan bahwa keanggotaan aktif dalam NU memiliki daya penjelas yang jauh lebih kuat dan konsisten dibandingkan kedekatan simbolik semata.

Literatur mengenai perilaku memilih warga NU sejauh ini menunjukkan perbedaan tajam antara dua kutub keserjanaan. *Pertama*, kubu keserjanaan yang memakai pendekatan *aliran* yang menegaskan bahwa afiliasi sosial-keagamaan masih membentuk preferensi politik secara relatif stabil (Ufen, 2006; Fossati, 2019). Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh konsep politik aliran, yang merujuk pada pembelahan sosial-budaya yang relatif stabil dan terlembagakan dalam perilaku politik (Geertz, 1960). Geertz membedakan masyarakat Jawa ke dalam tiga aliran utama—santri, abangan, dan priyayi—yang masing-masing memiliki orientasi religius, sosial, dan politik yang berbeda. Dalam kerangka ini, NU diposisikan sebagai representasi utama santri tradisional, dengan basis sosial yang kuat di pedesaan Jawa.

Pendekatan aliran kemudian digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih yang relatif stabil pada masa demokrasi parlementer 1950-an dan bahkan bertahan secara laten selama Orde Baru (Feith, 1962). Dalam konteks NU, hubungan antara identitas keagamaan, jaringan pesantren, dan preferensi politik dianggap membentuk ikatan elektoral jangka panjang, yang pasca-Reformasi menemukan ekspresi politiknya melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejumlah studi awal pasca-1998 menunjukkan bahwa PKB berhasil memobilisasi suara NU secara signifikan, terutama pada Pemilu 1999 dan 2004 (Bush, 2009; Ufen, 2006).

Namun, jika benar kerangka politik aliran masih bekerja, mengapa ekspresi politik NU tidak pernah sepenuhnya monolitik. Sejak keputusan “kembali ke khittah” pada 1984, NU secara formal menarik diri dari politik praktis, membuka ruang bagi preferensi politik yang beragam di kalangan warganya. Hal ini menciptakan ketegangan antara NU sebagai milieu sosial-keagamaan dan NU sebagai entitas politik tidak langsung.

*Kedua*, kubu keserjanaan yang menggunakan pendekatan *dealignment* (dealiranisasi) dan personalisasi politik dalam menjelaskan perilaku elektoral warga Nahdliyin. Kubu ini menekankan proses dealiranisasi di

mana santrinisasi abangan membuat batas-batas antar-aliran menjadi kabur dan pada saat yang sama terjadi peningkatan peran figur, kinerja petahana, serta koalisi calon presiden dalam menentukan perilaku pemilih, termasuk warga Nahdhiyin. Pioner madzab intelektual ini adalah Saiful Mujani dan William Liddle (2007) yang merujuk pada Pilpres 2004 di mana basis identitas sosial dan *party identification* melemah, sementara daya tarik personal kandidat justru menguat. Konsekuensinya, pemilih, termasuk warga NU, semakin cair dan pragmatis (Muhtadi, 2019; Muhtadi, 2020).

Kubu dealiranisasi ini menantang viabilitas politik aliran. Mujani dan Liddle (2007) menunjukkan bahwa dukungan elektoral di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh evaluasi kinerja, kepemimpinan, dan kondisi ekonomi daripada identitas sosial atau keagamaan. Fenomena ini sejalan dengan literatur *dealignment* di demokrasi maju, yang menunjukkan melemahnya ikatan tradisional antara pemilih dan partai akibat modernisasi, pendidikan, dan ekspansi media (Dalton, 2004). Dalam konteks Indonesia, proses ini dipercepat oleh pemilihan presiden langsung sejak 2004, yang mendorong personalisasi politik dan melemahkan peran partai sebagai perantara utama.

Bagi warga NU, pendekatan dealiranisasi berarti bahwa identitas keagamaan tidak lagi secara otomatis menentukan pilihan elektoral. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pemilih NU semakin sering melakukan *split-ticket voting*, memilih partai tertentu dalam pemilu legislatif tetapi kandidat presiden yang berbeda dalam pilpres (Qodari, 2015). Dengan demikian, kubu ini mengklaim NU kehilangan daya deterministiknya dalam menjelaskan perilaku memilih.

Berdasarkan literatur di atas, terdapat celah penting dalam studi tentang NU dan perilaku memilihnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya memperlakukan identitas NU secara monolitik tanpa membedakan antara kedekatan kultural keagamaan dan keanggotaan organisasional. Studi ini berkontribusi dengan membedakan secara eksplisit kedua dimensi tersebut dan menunjukkan bahwa keanggotaan aktif NU memiliki daya penjelas yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar identitas kultural NU.

Studi ini berusaha menjembatani *deadlock* antara pendekatan aliran dan dealiranisasi. Hipotesis studi ini adalah NU tidak mati sebagai basis sosial politik, tetapi juga tidak lagi berfungsi sebagai penentu otomatis. Kami meyakini pengaruh NU masih bekerja melalui mekanisme jaringan, isyarat (*elite cues*), dan aktivasi organisasi, khususnya dalam konteks politik elektoral yang semakin terpersonalisasi sejak Pilpres 2004. Keanggotaan aktif dalam NU diduga meningkatkan eksposur warga Nahdliyin terhadap diskursus internal, arahan elite, dan pertimbangan strategis organisasi. Dengan demikian NU dipercaya tetap memiliki dampak elektoral yang nyata,

tetapi dampak tersebut bersifat kondisional dan berlapis, tergantung pada tingkat keterlibatan individu dalam organisasi.

Berdasarkan perdebatan madzab intelektual di atas, studi ini mengajukan tiga pertanyaan utama: *Pertama*, sejauh mana kedekatan warga dengan NU memengaruhi pilihan partai politik dan pilihan presiden dalam Pemilu 2024? *Kedua*, apakah keaktifan organisasional dalam NU memiliki efek elektoral yang berbeda dibandingkan sekadar kedekatan kultural dengan NU? *Ketiga*, apakah “efek NU” masih bekerja secara langsung, ataukah ia dimediasi oleh faktor-faktor lain seperti demografi dan evaluasi terhadap presiden petahana?

Untuk menguji hipotesis di atas, kami menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikawinkan dengan observasi mendalam terhadap perilaku elektoral NU. Terdapat dua sumber data utama: *pertama*, survei besar di dua basis utama NU, yaitu Jawa Timur (N=10.800) dan Jawa Tengah (N=10.100), yang dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dan wawancara tatap muka. *Margin of error* masing-masing sekitar  $\pm 1,1\%$  pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang terdiri dari 200 responden di tiap kota (kecuali Kota Surabaya 400 responden) dan 300 responden di tiap kabupaten. Karena besarnya sampel ini, studi ini mampu melakukan analisis per kabupaten/kota. Proses wawancara di lapangan dilakukan pada Desember 2023 oleh tim pewawancara independen dari Indikator Politik yang sudah terlatih melakukan survei opini publik.

*Kedua*, survei nasional di seluruh provinsi di Indonesia dengan *oversample* di 18 provinsi (N=5.500), yang memungkinkan perbandingan antara 18 provinsi dengan agregat nasional. Semua survei menerapkan kontrol kualitas melalui *spot check* minimal 20% responden. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Survei nasional ini dilakukan pada 28 Januari – 4 Februari 2024 atau dua minggu sebelum Pemilu 2024.

Dalam survei di dua basis utama NU Jawa Timur dan Jawa Tengah, afiliasi dan kedekatan responden dengan NU diukur secara multidimensional. *Pertama*, responden ditanya tingkat afiliasinya pada ormas Islam, apakah mereka merasa menjadi bagian dari NU, Muhammadiyah, ormas Islam lain, atau tidak berafiliasi dengan ormas Islam mana pun. *Kedua*, identitas ke-NU-an diukur melalui *self-identification* sebagai santri tradisional, yang dibedakan dari kategori santri modernis, atau priyayi dan abangan, untuk menangkap orientasi kultural-keagamaan yang lebih luas. *Ketiga*, studi ini menggunakan intensitas melakukan ritual khas NU meliputi qunut, tahlilan/yasinan, ziarah kubur, dan ikut khaul kiai tertentu sebagai indikator

tambahan untuk menangkap dimensi praksis dari identitas dan tradisi ke-NU-an.

Sementara dalam survei nasional, relasi dengan NU diukur melalui dua indikator, yakni kedekatan dengan NU secara kultural dan keaktifan dalam organisasi NU. Mengingat tujuan utama studi ini adalah menangkap perilaku politik warga Nahdliyin pada tingkat nasional, serta karena survei nasional dilaksanakan tepat menjelang Pemilu 2024, kedua variabel dalam survey nasional inilah yang dianalisis secara lebih sistematis dalam pengujian inferensial. Sebaliknya, survei di basis NU, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, dilakukan sekitar dua bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga relatif kurang mampu memotret preferensi elektoral secara pasti. Oleh karena itu, temuan dari survei di Jawa Timur dan Jawa Tengah—yang memuat tiga indikator ke-NU-an—hanya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, untuk menggambarkan proporsi dan profil warga NU berdasarkan berbagai dimensi identitas dan ritual Nahdliyin.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Survei di Dua Basis NU**

Studi kami menemukan 78% responden Muslim di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengaku NU. Angka ini jauh melampaui ormas-ormas Islam lain, seperti Muhammadiyah (4,4%) maupun ormas Islam lainnya (1,1%). Hanya sekitar 16% responden yang menyatakan bukan bagian dari organisasi Islam mana pun. Temuan ini menegaskan bahwa NU merupakan referensi keagamaan yang sangat dominan di dua provinsi basis utamanya. Dibandingkan dengan tingkat nasional, di mana hanya sekitar 54,6% responden Muslim yang mengaku NU, proporsi Nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah tampak jauh lebih tinggi. Perbedaan ini mengonfirmasi posisi kedua provinsi tersebut sebagai basis sosiologis utama NU, sekaligus menjelaskan mengapa dinamika politik Nahdliyin di wilayah ini memiliki bobot yang sangat besar dalam politik elektoral Indonesia, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan pemilih terbesar kedua dan ketiga se-Indonesia.

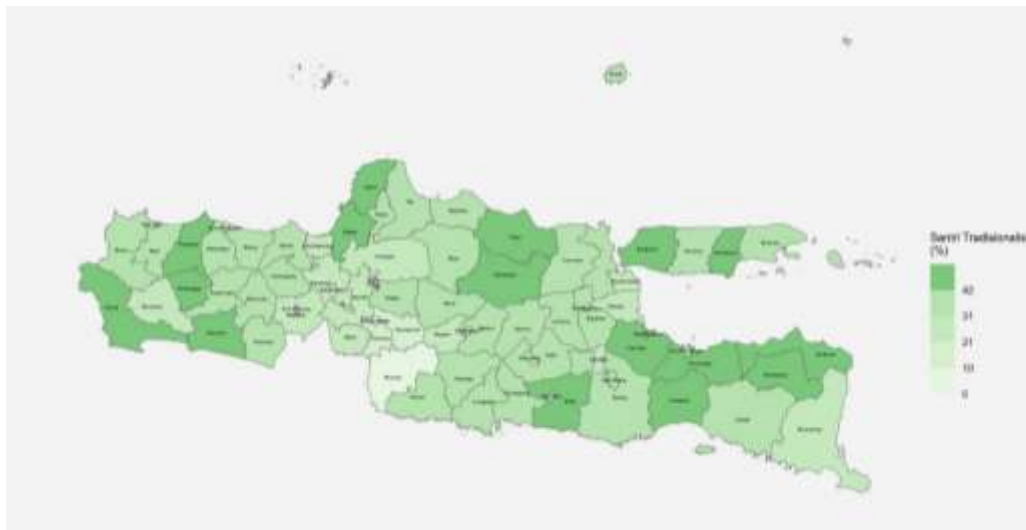
Jika keterikatan terhadap NU diukur melalui *self-description* secara kultural, yaitu apakah responden mengidentifikasi diri sebagai santri, priyayi, atau abangan, terlihat pola yang sangat jelas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka yang mengaku sebagai santri mencapai 65,7% (Tabel 1). Jika diperinci lebih jauh, responden yang mengaku sebagai santri tradisional—kategori yang paling dekat dengan identitas NU—merupakan kelompok terbesar di kedua provinsi tersebut, dengan proporsi yang paling tinggi di Jawa Timur. Sebaliknya, kategori priyayi dan abangan relatif lebih kecil jumlahnya. Analisis lebih mendalam terhadap basis santri tradisional menurut kabupaten/kota ditampilkan di Gambar 1. Temuan ini menegaskan

bahwa basis sosiologis NU tidak hanya tercermin dalam kedekatan secara kultural, tetapi juga tertanam kuat dalam identitas kultural dan cara responden mendefinisikan diri mereka sendiri, terutama di Jawa Timur sebagai jantung tradisionalisme NU.

**Tabel 1:** Proporsi Muslim di Jawa Timur dan Jawa Tengah Berdasarkan Aliran (%)

	GABUNGAN	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR
<b>Santri</b>	<b>65.7</b>	<b>63.5</b>	<b>67.7</b>
<b>Base: Muslim</b>			
Santri Tradisionalis	36.2	35.1	37.2
Santri Modernis	18.2	18.8	17.7
Tidak jawab	11.3	9.6	12.8
<b>Base: Santri</b>			
Santri Tradisionalis	55.1	55.3	54.9
Santri Modernis	27.7	29.6	26.2
Tidak jawab	17.2	15.2	18.9
<b>Abangan</b>	<b>14.9</b>	<b>18.0</b>	<b>12.1</b>
<b>Priyayi</b>	<b>4.2</b>	<b>5.1</b>	<b>3.4</b>
<b>Tidak jawab</b>	<b>15.2</b>	<b>13.3</b>	<b>16.9</b>

**Gambar 1:** Basis Santri Tradisionalis Menurut Kabupaten/Kota (%)



Tabel 2 memperlihatkan bahwa responden Muslim yang mengidentifikasi diri sebagai santri tradisionalis memiliki profil sosial yang

khas dan relatif homogen, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai *wong cilik*. Mereka lebih banyak berasal dari kelompok petani dan pekerja informal, memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah, serta lebih dominan pada kelompok usia tua. Selain itu, santri tradisional juga lebih terkonsentrasi di wilayah pedesaan, yang selama ini merupakan basis sosial utama NU. Pola ini sangat kontras dengan responden yang mengaku sebagai santri modernis, yang cenderung lebih muda, lebih terdidik, berpendapatan lebih tinggi, dan lebih banyak tinggal di wilayah perkotaan, serta lebih sering berprofesi sebagai pegawai, profesional, atau mahasiswa. Perbedaan profil sosial-ekonomi ini menegaskan bahwa santri tradisional dan santri modernis bukan hanya berbeda dalam orientasi keagamaan, tetapi juga merepresentasikan dua strata sosial yang berbeda, yang pada gilirannya berimplikasi penting bagi perilaku politik dan preferensi elektoral mereka.

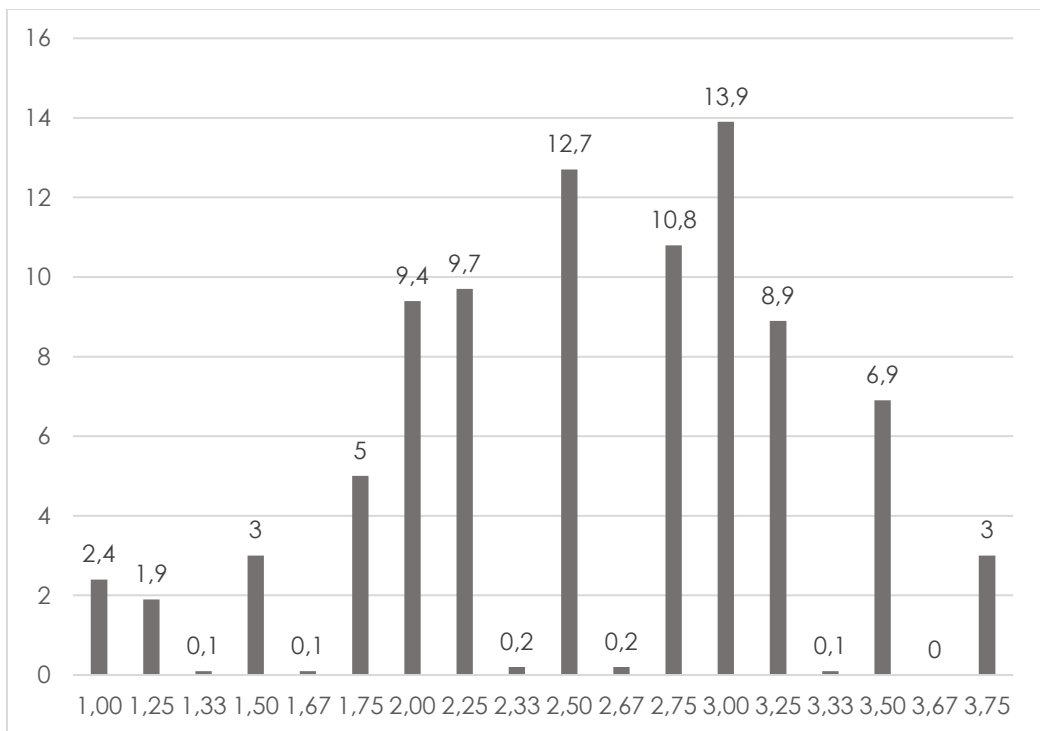
**Tabel 2: Breakdown Demografi Santri Tradisionalis dan Modernis (%)**

	Santri	Abangan	Priyayi	Tidak Jawab	Santri Tradisionalis	Santri Modernis	Tidak Jawab	Non Santri
<b>GENDER</b>								
Laki-laki	64.3	16.3	4.4	14.9	37.0	16.7	10.6	35.7
Perempuan	67.1	13.5	4.0	15.5	35.4	19.7	12.0	32.9
<b>GENERASI</b>								
Gen Z (1997 - 2012)	69.4	13.0	4.2	13.4	26.4	32.8	10.2	30.6
Millenials (1981 - 1996)	65.2	15.9	4.3	14.6	33.7	20.4	11.2	34.8
Gen X (1965 - 1980)	64.7	16.0	4.2	15.2	39.8	13.7	11.2	35.3
Babby Boomer+ (1918 - 1964)	64.4	13.6	4.2	17.9	44.3	7.4	12.6	35.6
<b>SUKU</b>								
Jawa	64.8	16.1	4.2	14.9	35.2	18.7	11.0	35.2
Madura	73.8	4.9	4.4	16.8	45.0	13.9	15.0	26.2
Lainnya	65.5	10.5	1.8	22.2	38.9	18.2	8.5	34.5
<b>PENDIDIKAN</b>								
<= SD	65.3	15.4	3.7	15.7	43.2	9.2	12.9	34.7
SLTP	65.6	16.0	3.6	14.8	36.9	17.5	11.1	34.4
SLTA	66.0	14.3	5.1	14.7	29.1	27.0	9.8	34.0
Kuliah	67.2	12.2	5.6	15.0	23.3	35.1	8.8	32.8
<b>PEKERJAAN</b>								
Petani/peternak/nelayan	65.6	15.4	3.2	15.8	44.1	8.8	12.6	34.4
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	64.1	16.6	4.1	15.2	35.3	18.0	10.8	35.9
Wiraswasta, pengusaha	66.0	16.1	4.3	13.5	34.0	19.6	12.4	34.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	67.7	12.2	6.1	14.0	26.0	34.5	7.1	32.3
Ibu Rumah Tangga	66.7	13.6	4.2	15.5	37.7	17.5	11.5	33.3
Masih sekolah/kuliah	70.1	13.0	3.7	13.2	17.7	40.9	11.5	29.9
Lainnya	63.1	14.3	5.9	16.6	36.9	14.5	11.7	36.9
<b>PENDAPATAN</b>								
< 1 juta	67.6	13.1	3.8	15.5	40.9	13.1	13.6	32.4
1 - < 2 juta	65.1	16.0	3.9	15.1	37.7	16.8	10.6	34.9
2 - < 4 juta	64.7	16.8	4.9	13.5	31.4	23.8	9.4	35.3
=> 4 juta	65.4	14.9	5.7	14.0	26.5	30.4	8.6	34.6
<b>PEDESAAN/URBAN</b>								
Pedesaan	67.3	14.6	3.8	14.4	39.8	15.1	12.3	32.7
Urban	63.9	15.3	4.7	16.1	31.9	21.8	10.1	36.1

Selain mengukur kedekatan sosio-kultural dan orientasi keagamaan, survei berskala besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini juga memotret sejauh mana praktik ritual khas NU dijalankan oleh responden Muslim di dua provinsi ini. Empat ritual utama yang diukur meliputi: membaca qunut saat salat Subuh, tahlilan/yasinan, ziarah kubur, dan menghadiri khaul kiai. Masing-masing ritual diukur menggunakan skala 1 hingga 4, di mana 1 berarti tidak pernah dan 4 berarti sangat sering.

Grafik 1 menampilkan *mean score* dari kombinasi keempat praktik ritual tersebut. Distribusi skor menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang menengah hingga tinggi, dengan konsentrasi kuat di kisaran 2,5 hingga 3,5. Pola ini mengindikasikan bahwa praktik ritual NU bukan fenomena marginal, melainkan dijalankan secara cukup intens oleh sebagian besar Muslim di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan kata lain, dimensi ritual praksis ke-NU-an masih sangat hidup di basis tradisional NU.

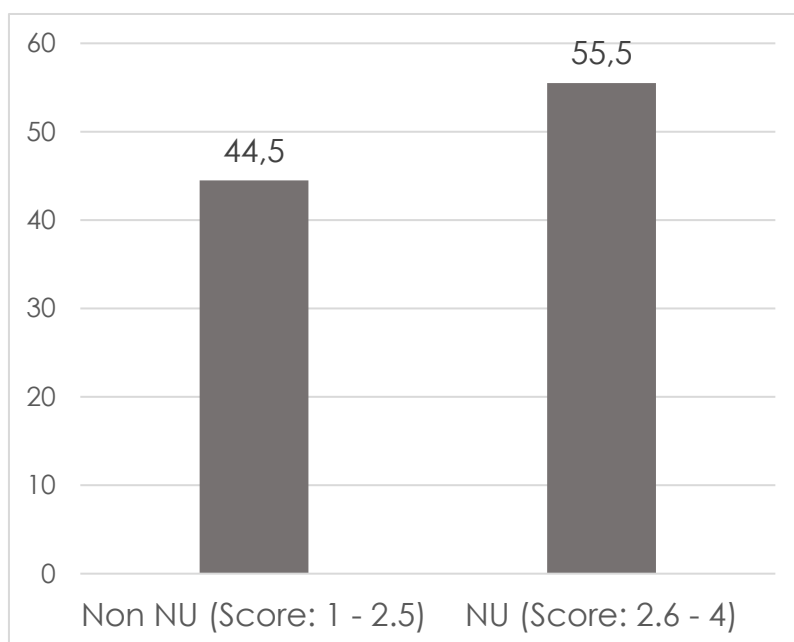
**Grafik 1:** Intensitas Praktik Ritual NU (*Mean Scores*)



Berdasarkan skor rata-rata praktik ritual tersebut, kami kemudian membuat indeks ritual NU dan mengelompokkan responden ke dalam dua kategori. Responden dengan skor 1 hingga 2,5 diklasifikasikan sebagai Non-NU, sedangkan mereka yang memiliki skor 2,6 hingga 4 dikategorikan sebagai NU. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 55,5% responden Muslim

di Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk dalam kategori NU berdasarkan praktik ritual, sementara 44,5% lainnya tergolong Non-NU (Grafik 2). Temuan ini penting karena menegaskan bahwa lebih dari separuh Muslim di dua provinsi basis NU tidak hanya mengaku dekat secara identitas kultural, tetapi juga menjalankan praktik ritual NU secara nyata dan relatif rutin. Indeks ritual ini memperkuat analisis sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keterikatan terhadap NU tidak berhenti pada level simbolik atau afiliasi organisasi, melainkan juga tercermin dalam praktik keagamaan sehari-hari.

**Grafik 2:** Klasifikasi NU vs Non-NU Berdasarkan Indeks Ritual Nahdliyin (%)

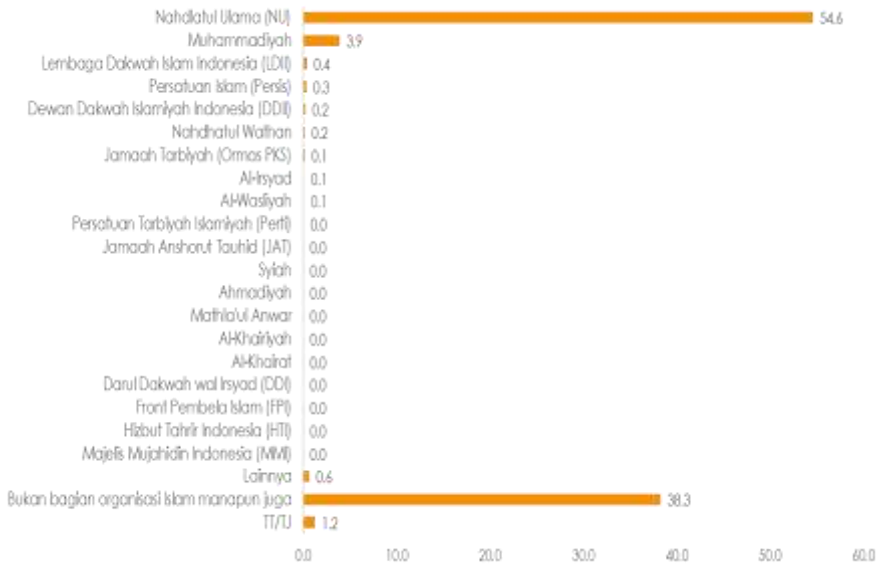


## Survei Nasional

Studi kami secara nasional menegaskan bahwa NU tetap menjadi organisasi Islam dengan tingkat afiliasi tertinggi secara nasional, jauh melampaui organisasi Islam lainnya. Secara nasional, 54,6% responden Muslim mengaku sebagai NU, sementara hanya 3,9% yang menyatakan kedekatan dengan Muhammadiyah, dan proporsi yang lebih kecil lagi dengan ormas-ormas Islam yang lain (Grafik 3). Namun, temuan ini juga memperlihatkan bahwa tingkat kedekatan terhadap NU pada level nasional masih lebih rendah dibandingkan survei di provinsi basis NU, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana sekitar 78% responden Muslim mengaku

dekat dengan NU. Perbedaan yang cukup mencolok ini menegaskan bahwa kekuatan sosiologis NU sangat terkonsentrasi secara geografis, dengan basis paling solid berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung dan Papua (Gambar 2), sementara di luar wilayah tersebut kedekatan terhadap NU tetap dominan tetapi lebih terfragmentasi. Jadi, meskipun NU merupakan organisasi Islam paling berpengaruh secara nasional, intensitas dan kedalaman keterikatan warganya sangat bervariasi antarwilayah.

**Grafik 3: Tingkat Afiliasi terhadap Ormas Islam di Indonesia (%) (base: Khusus Muslim)**

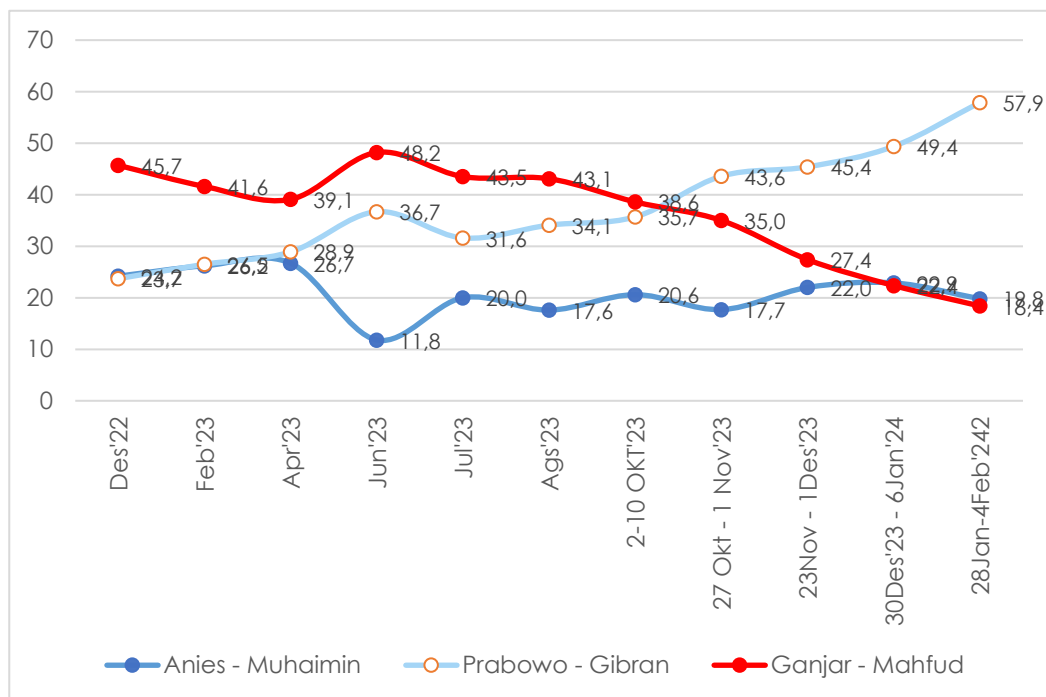


**Gambar 2: Afiliasi kepada NU Menurut Provinsi (%) (base: Khusus Muslim)**



Grafik 4 menunjukkan dinamika yang sangat penting dalam perilaku elektoral responden yang mengaku sebagai NU secara nasional. Pada fase awal periode kampanye, mayoritas warga NU cenderung mendukung Ganjar-Mahfud, mencerminkan kesinambungan historis dengan pola pemilu sebelumnya. Dalam Pemilu 2014 dan 2019, basis NU merupakan basis utama Jokowi, dan Ganjar pada awalnya dipersepsikan sebagai kandidat yang paling dekat dengan warisan politik tersebut. Namun, seiring semakin dekatnya hari pemungutan suara, terjadi pergeseran dukungan yang tajam dan konsisten dari Ganjar-Mahfud ke Prabowo-Gibran. Dukungan terhadap Prabowo di kalangan warga NU meningkat signifikan dan akhirnya melampaui Ganjar menjelang pemilu, sementara dukungan terhadap Ganjar terus menurun. Pola ini menunjukkan bahwa efek Jokowi sangat kuat dalam mengalihkan dukungan warga NU dari Ganjar ke Prabowo (Muhtadi, 2024; Muhtadi, 2025). Harus digarisbawahi bahwa temuan ini baru bersifat sugestif karena belum dilakukan analisis multivariat untuk menguji sejauhmana relasi positif antara kedekatan dengan NU dan pilihan ke Prabowo bersifat independen atau tidak setelah dikontrol variabel bebas yang lain.

**Grafik 4:** Tren Tiga Pasangan Calon Pada Kelompok Terafiliasi NU (%)  
[Sebelum 27 Oktober, Simulasi Tanpa Pasangan]

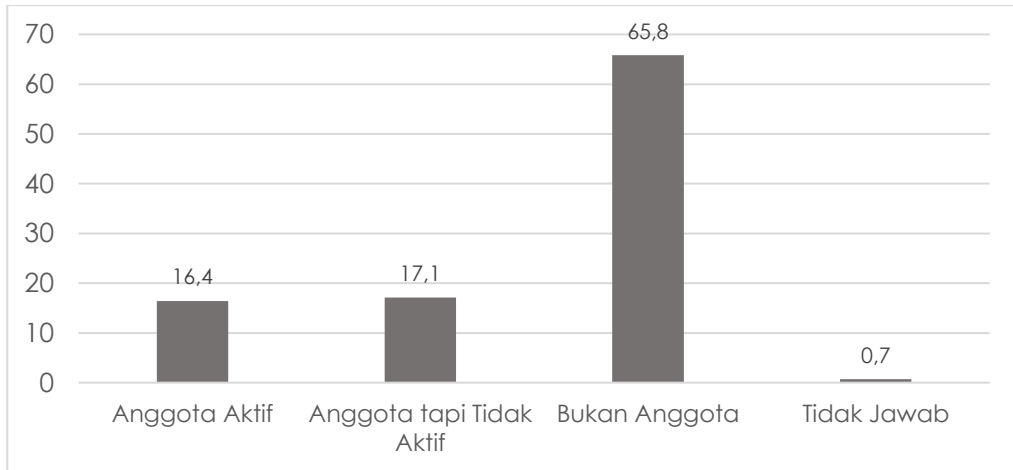


Yang juga menarik, Anies–Muhaimin gagal memanfaatkan faktor NU meskipun Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB dan figur yang secara langsung diasosiasikan dengan NU. Dukungan Anies di kalangan warga NU tetap relatif rendah dan stabil sepanjang periode kampanye. Demikian pula, kehadiran Mahfud MD—yang memiliki latar belakang NU— sebagai cawapres Ganjar, tidak mampu menghentikan migrasi suara NU ke Prabowo, meskipun Prabowo dan Gibran tidak memiliki kedekatan ideologis, simbolik, maupun organisasional dengan NU. Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks Pemilu 2024, identitas dan simbol NU tidak cukup kuat untuk menandingi pengaruh langsung Presiden Jokowi, dan bahwa loyalitas elektoral warga NU lebih responsif terhadap sinyal kekuasaan dan elite politik nasional dibandingkan afiliasi keagamaan formal.

Penting dicatat, afiliasi terhadap NU tidak berbanding lurus dengan keaktifan organisasional. Meskipun survei nasional menunjukkan bahwa lebih dari separuh Muslim Indonesia mengaku dekat dengan NU, hanya sekitar 16% responden Muslim yang tercatat sebagai anggota aktif NU. Sekitar 17% lainnya mengaku sebagai anggota NU tetapi tidak aktif, sementara hampir dua pertiga (65,8%) menyatakan tidak menjadi anggota NU sama sekali (Grafik 5). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang besar antara identitas kultural dan keterlibatan organisasi, di mana NU lebih berfungsi sebagai rujukan sosial-keagamaan yang luas daripada sebagai organisasi dengan basis keanggotaan formal yang masif.

Selain itu, data nasional juga memperlihatkan variasi regional yang signifikan dalam tingkat keaktifan NU. Keanggotaan aktif di NU jauh lebih tinggi di wilayah basis tradisional Nahdliyin seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan menariknya, di provinsi-provinsi mayoritas non-Muslim, umat Muslimnya umumnya aktif di NU (Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua) (Gambar 3). Sementara di beberapa wilayah, NU lebih hadir sebagai identitas simbolik daripada jaringan organisasi yang aktif. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bahwa pengaruh politik NU sangat bergantung pada konteks wilayah dan tingkat aktivasi organisasional, bukan semata-mata pada klaim kedekatan identitas kultural keagamaan.

**Grafik 5:** Keaktifan Umat Islam dalam Organisasi NU (%)



**Gambar 3:** Anggota aktif dalam Ormas NU Menurut Provinsi (%) (base: Khusus Muslim)

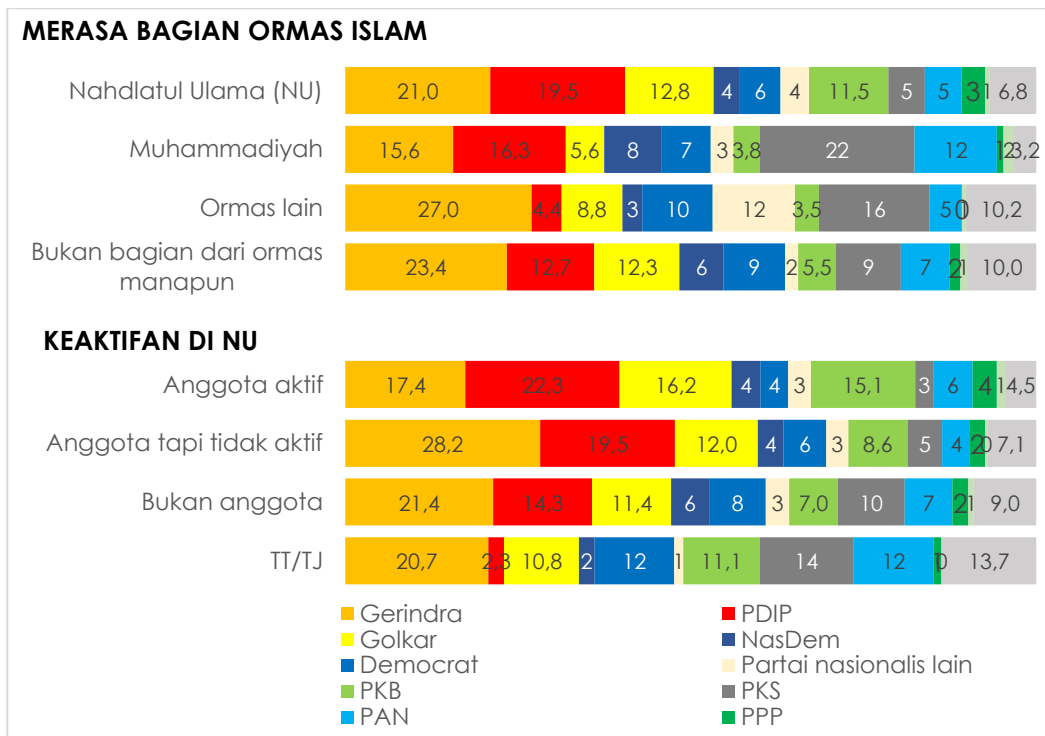


### Analisis Bivariat dan Multivariat

Sekarang kita sampai pada sub-bagian paling penting dalam studi ini: bagaimana preferensi elektoral warga NU yang diukur baik melalui kedekatan terhadap ormas NU maupun keaktifan dalam organisasi NU? Preferensi elektoral diukur melalui dua hal: (1) pilihan dalam pemilu legislatif dan (2) calon presiden-wakil presiden.

Grafik 6 memperlihatkan beberapa pola penting. *Pertama*, dalam pilihan legislatif, warga NU—baik yang merasa punya afiliasi dengan NU maupun yang aktif secara organisasional—tidak terpusat pada satu partai, tetapi menunjukkan kecenderungan yang relatif konsisten: PDIP, Gerindra, dan PKB tampil menonjol di kalangan warga yang merasa NU maupun yang aktif, sementara dukungan terhadap PKS dan partai-partai non-NU relatif lebih rendah. Sebaliknya, di kalangan Muslim non-NU, dukungan terhadap PKB jauh lebih kecil dan suara lebih tersebar ke partai-partai nasionalis lain. Pola ini menunjukkan bahwa keaktifan organisasional dalam NU lebih kuat memprediksi pilihan partai dibandingkan sekadar kedekatan kultural atau identitas santri

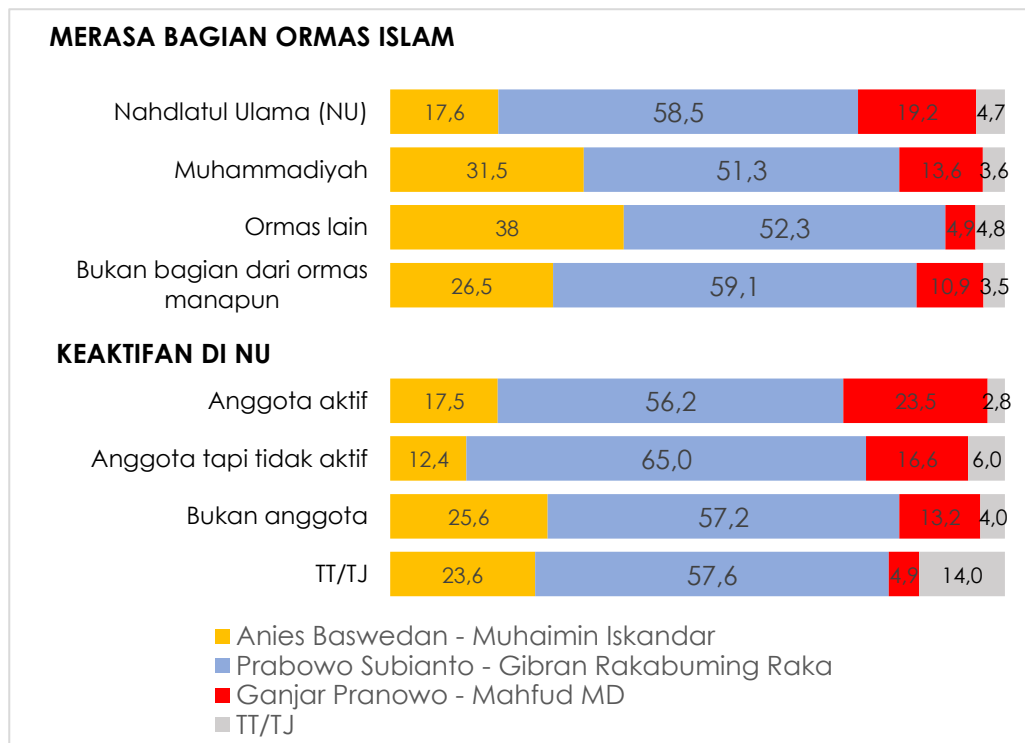
**Grafik 6:** Pilihan Partai Berdasarkan Afiliasi dan Keaktifan di NU (%)



Sementara Grafik 7 menjelaskan tabulasi silang dengan pilihan presiden, pola yang muncul lebih cair dan kurang terpolarisasi berdasarkan afiliasi kepada NU. Di hampir semua kategori—baik merasa NU maupun anggota aktif NU—Prabowo–Gibran memperoleh dukungan terbesar, sementara Ganjar–Mahfud relatif lebih kuat di kalangan warga yang aktif di NU. Perbedaan antar-kelompok NU dalam Pilpres tampak lebih kecil dibandingkan dalam pemilu legislatif, mengindikasikan bahwa identitas dan keaktifan NU lebih relevan dalam membentuk pilihan partai daripada pilihan

presiden, yang cenderung dipengaruhi faktor personalisasi kandidat dan dinamika politik nasional.

**Grafik 7: Pilihan Presiden/Wakil Presiden Berdasarkan Afiliasi dan Keaktifan di NU (%)**



Namun, indikasi deskriptif dan asosiasi awal di atas belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kedekatan terhadap ormas NU maupun keaktifan dalam organisasi NU memiliki dampak yang mandiri dan kausal terhadap pilihan partai politik atau kandidat presiden. Hubungan yang tampak pada tingkat deskriptif berpotensi bersifat *spurious*, yakni muncul semata-mata karena kedekatan NU berkorelasi dengan faktor-faktor lain yang secara independen memengaruhi perilaku memilih. Misalnya, warga NU cenderung terkonsentrasi di wilayah pedesaan, memiliki karakteristik demografis tertentu, atau menunjukkan tingkat evaluasi politik yang berbeda terhadap presiden petahana. Tanpa mengendalikan faktor-faktor tersebut, sulit memastikan apakah pengaruh NU benar-benar mencerminkan efek identitas dan jaringan organisasi, atau sekadar efek tidak langsung dari variabel lain yang berkorelasi dengannya. Oleh karena itu, analisis multivariat menjadi

krusial untuk membedakan antara asosiasi semu dan pengaruh yang substantif.

Untuk itu, studi ini menggunakan regresi logistik biner untuk memodelkan variabel dependen dikotomis berupa pilihan presiden dan pilihan partai politik pada Pemilu 2024. Analisis dilakukan dalam dua spesifikasi model. Model pertama merupakan model bivariat, yang hanya menguji hubungan langsung antara kedekatan NU dan keaktifan dalam NU dengan masing-masing pilihan elektoral. Model ini berguna untuk memetakan arah dan kekuatan asosiasi awal. Model kedua adalah model multivariat, di mana efek kedekatan dan keaktifan di NU dikontrol oleh sejumlah variabel yang secara teoritis dan empiris diyakini memengaruhi pilihan politik, yakni gender, usia, etnis, tingkat pendidikan, lokasi desa/kota, serta *approval rating* terhadap Presiden Jokowi. Statistik deskriptif dan penjelasan skala dan kodingnya di Tabel 3:

**Tabel 3:** Statistik Deskriptif, Skala dan Koding

	Descriptive Statistics					Scale
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
<b>VARIABEL DEPENDEN</b>						
<b>Pilihan Capres</b>						
Anies	4623	0	1	.230	.421	1 = Pilih Anies-Muhammad; 0 = Lainnya
Prabowo	4623	0	1	.609	.488	1 = Pilih Prabowo-Gibran; 0 = Lainnya
Ganjar	4623	0	1	.161	.368	1 = Pilih Ganjar-Mahfud; 0 = Lainnya
<b>Pilihan Partai</b>						
PKB	4242	0	1	.099	.298	1 = Pilih PKB; 0 = Lainnya
Gerindra	4242	0	1	.249	.432	1 = Pilih Gerindra; 0 = Lainnya
PDIP	4242	0	1	.187	.390	1 = Pilih Gerindra; 0 = Lainnya
Golkar	4242	0	1	.140	.347	1 = Pilih Golkar; 0 = Lainnya
NasDem	4242	0	1	.056	.231	1 = Pilih NasDem; 0 = Lainnya
PKS	4242	0	1	.088	.284	1 = Pilih PKS; 0 = Lainnya
PAN	4242	0	1	.071	.257	1 = Pilih PAN; 0 = Lainnya
Demokrat	4242	0	1	.082	.274	1 = Pilih Demokrat; 0 = Lainnya
PPP	4242	0	1	.028	.165	1 = Pilih PPP; 0 = Lainnya
<b>VARIABEL INDEPENDEN</b>						
<b>Efek Utama</b>						
Identitas NU	4826	0	1	.548	.498	1 = Merasa bagian NU; 0 = Lainnya
Keaktifan di NU	4826	0	1	.164	.370	1 = Anggota aktif NU; 0 = Lainnya
<b>Kontrol</b>						
Desa/Kota	4826	0	1	.497	.500	1 = Perkotaan; 0 = Pedesaan
Umur	4826	17	87	41.031	15.479	
Gender	4826	0	1	.501	.500	1 = Laki-laki; 0 = Perempuan
Etnik	4826	0	1	.447	.497	1 = Jawa; 0 = Etnis lainnya
Pendidikan	4826	1	10	5.218	2.448	1 = Tidak pernah sekolah; ...; 10 = Tamat S1 atau lebih tinggi
Approval Jokowi	4806	1	4	2.925	.640	1 = Tidak puas sama sekali; ...; 4 = Sangat puas

Dengan membandingkan hasil antara dua model bivariat dan multivariat ini, analisis dapat menguji apakah “efek NU” tetap signifikan dan stabil setelah faktor-faktor penjelas alternatif diperhitungkan. Jika koefisien NU

bertahan dalam model multivariat, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh NU bersifat independen dan substantif; sebaliknya, jika koefisien tersebut melemah atau menghilang, hal ini mengindikasikan bahwa hubungan sebelumnya sebagian atau seluruhnya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4 menyajikan hasil regresi logistik biner untuk menjelaskan pengaruh identitas kultural NU—diukur melalui variabel *afiliasi kepada NU*—terhadap pilihan presiden dan partai politik pada Pemilu 2024. Variabel utama dikodekan sebagai 1 bagi responden yang merasa dekat dengan NU dan 0 bagi responden lainnya. Angka yang dilaporkan dalam tabel merupakan koefisien logit ( $\beta$ ). Nilai koefisien  $\beta$  yang negatif menunjukkan perubahan peluang yang semakin rendah/menurun, sebaliknya jika koefisien  $\beta$  bernilai positif menunjukkan perubahan peluang yang semakin besar/meningkat. Koefisien  $\beta$  juga kerap dikonversi ke odds ratio ( $OR = \exp(\beta)$ ) untuk memudahkan interpretasi substantif. Nilai OR di atas 1 menunjukkan besarnya peningkatan peluang memilih, sedangkan nilai di bawah 1 menunjukkan besarnya penurunan peluang.

**Tabel 4:** Regresi Efek Identitas Kultural NU terhadap Pilihan Presiden dan Partai 2024

Merasa NU	Model Bivariat	Model Multivariat
Anies - Muhaimin	-0.564 ***	-0.245 ***
Prabowo - Gibran	0.046	-0.095
Ganjar - Mahfud	0.688 ***	0.410 ***
PKB	0.834 ***	0.819 ***
Gerindra	-0.135 *	-0.113
PDIP	0.513 ***	0.225 **
Golkar	0.096	TT
NasDem	-0.580 ***	-0.445 ***
PKS	-0.803 ***	-0.585 ***
PAN	-0.361 ***	-0.453 ***
Demokrat	-0.450 ***	-0.375 ***
PPP	0.916 ***	0.940 ***

Note: TT = Tidak Tersedia. Analisis multivariat hanya dilakukan terhadap variabel yang signifikan dalam model bivariat. \* $p < 0.1$ ; \*\* $p < 0.05$ ; \*\*\* $p < 0.01$ .

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh identitas kultural NU terhadap pilihan presiden bersifat tidak simetris antar pasangan calon. Untuk pasangan Anies–Muhaimin, kedekatan NU berasosiasi negatif dan signifikan.

Dalam model bivariat, koefisien  $-0,564$  ( $OR \approx 0,57$ ) menunjukkan bahwa responden NU sekitar 43% kurang mungkin memilih pasangan ini dibandingkan responden non-NU. Meskipun efek tersebut melemah dalam model multivariat ( $\beta = -0,245$ ;  $OR \approx 0,78$ ), hubungan negatifnya tetap signifikan, menandakan bahwa studi kami menemukan bukti empirik yang menunjukkan resistensi warga NU terhadap Anies–Muhaimin. Faktor kepuasan warga Nahdliyin yang sangat tinggi terhadap Presiden Jokowi juga menjadi alasan keengganan mereka memilih paslon ini karena Anies sering mengumbar narasi perubahan dalam Pilpres 2024.

Sebaliknya, untuk pasangan Prabowo–Gibran, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara identitas ke-NU-an dan pilihan presiden, baik dalam model bivariat maupun multivariat. Nilai koefisien yang kecil dan tidak signifikan mengindikasikan bahwa warga NU tidak secara sistematis lebih atau kurang mungkin memilih Prabowo–Gibran. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan Prabowo di basis NU tidak berakar pada identitas NU itu sendiri, melainkan bersifat lintas identitas keagamaan. Dengan kata lain, pada Pilpres 2024 Prabowo berhasil menarik pemilih dari latar belakang ormas Islam yang beragam, termasuk NU. Hal ini berbeda dengan Pilpres 2014 dan 2019 di mana Prabowo menderita secara elektoral karena ditinggal warga NU yang lebih memilih Jokowi (Muhtadi, 2024; Muhtadi dan Muslim, 2024).

Untuk pasangan Ganjar–Mahfud, efek kedekatan kultural NU justru positif dan kuat. Dalam model bivariat, koefisien sebesar  $0,688$  ( $OR \approx 1,99$ ) mengindikasikan bahwa warga NU hampir dua kali lebih mungkin memilih pasangan ini dibandingkan non-NU. Meskipun efek tersebut berkurang setelah kontrol dimasukkan ( $\beta = 0,410$ ;  $OR \approx 1,51$ ), kedekatan NU tetap meningkatkan peluang memilih Ganjar–Mahfud sekitar 51%. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan Ganjar–Mahfud memiliki daya tarik simbolik dan kultural yang relatif kuat di kalangan NU.

Sementara pengaruh kedekatan NU terhadap pilihan partai terlihat jauh lebih konsisten dan kuat dibandingkan pilihan presiden. Efek paling menonjol ditemukan pada PKB, di mana koefisien positif dan signifikan tetap stabil antara model bivariat ( $\beta = 0,834$ ;  $OR \approx 2,30$ ) dan multivariat ( $\beta = 0,819$ ;  $OR \approx 2,27$ ). Temuan ini menunjukkan bahwa warga NU memiliki peluang lebih dari dua kali lipat untuk memilih PKB dibandingkan non-NU, bahkan setelah seluruh kontrol dimasukkan. Hubungan elektoral NU–PKB dengan demikian tampak sangat solid dan tidak tereduksi oleh dinamika politik jangka pendek.

Hal ini menunjukkan fenomena *split-ticket voting* yang kuat di mana warga NU masih antusias memilih PKB, tapi enggan memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang maju sebagai cawapres Anies. Salah satu faktor yang menjelaskan adalah terpecahnya elite NU dalam Pilpres 2024. Ketua

Umum PBNU K.H Yahya Staquf aktif memobilisasi jaringan NU untuk mendukung paslon Prabowo-Gibran sehingga banyak warga NU yang tidak keberatan memilih PKB, tapi tidak melirik Anies-Muhaimin.

Kedekatan kultural NU juga meningkatkan peluang memilih PPP secara signifikan. Dalam model multivariat, koefisien sebesar 0,940 ( $OR \approx 2,56$ ) menunjukkan bahwa warga NU lebih dari dua setengah kali lebih mungkin memilih PPP dibandingkan responden non-NU. Efek ini tidak melemah setelah kontrol dimasukkan, mengindikasikan bahwa PPP masih memiliki ceruk elektoral yang kuat di segmen NU tertentu, meskipun secara nasional partai ini mengalami penurunan suara. Untuk PDIP, efek NU bersifat positif namun lebih moderat. Dalam model multivariat, warga NU sekitar 25% lebih mungkin memilih PDIP ( $OR \approx 1,25$ ). Hal ini mencerminkan kedekatan historis dan simbolik antara PDIP dan sebagian basis NU, meskipun hubungan tersebut tidak sekuat relasi NU dengan PKB atau PPP.

Sebaliknya, afiliasi NU secara konsisten menurunkan peluang memilih partai-partai lain seperti NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Nilai odds ratio yang berada pada kisaran 0,56 hingga 0,69 menunjukkan penurunan peluang antara 31 hingga 44%. Temuan ini mengindikasikan bahwa identitas NU berfungsi sebagai *filter elektoral negatif* terhadap partai-partai Islam non-NU maupun partai nasionalis-tengah kanan tertentu.

Pelemahan koefisien dari model bivariat ke model multivariat menunjukkan bahwa NU bukan satu-satunya determinan perilaku memilih. Namun, keberlanjutan signifikansi pada sejumlah pilihan kunci mengindikasikan bahwa NU tetap memiliki efek independen setelah faktor-faktor lain diperhitungkan. Secara teoretis, temuan ini mendukung pandangan bahwa NU tidak berfungsi sebagai *blok suara otomatis* atau permanen, melainkan sebagai *milieu* politik yang membentuk preferensi secara selektif—kuat pada kanal elektoral tertentu, namun lemah atau netral pada kanal lainnya.

Pada bagian terakhir kami menyajikan interpretasi substantif atas hasil regresi logistik biner yang menguji pengaruh *keanggotaan aktif dalam NU* terhadap pilihan presiden dan partai politik pada Pemilu 2024. Variabel utama dikodekan sebagai 1 bagi responden yang aktif dalam NU atau badan otonomnya (misalnya Muslimat NU, Fatayat NU dll), dan 0 bagi responden yang tidak aktif. Koefisien yang dilaporkan dalam tabel merupakan koefisien logit ( $\beta$ ), yang diinterpretasikan secara substantif melalui odds ratio ( $OR = \exp(\beta)$ ). Interpretasi difokuskan pada model multivariat, karena model ini mengestimasi efek bersih keanggotaan NU setelah mengontrol sejumlah faktor lain yang berpotensi memengaruhi pilihan politik. Perbandingan dengan model bivariat tetap disajikan untuk menilai sejauh mana hubungan yang teramati bersifat *spurious* atau bertahan setelah kontrol dimasukkan.

Tabel 5 menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara keanggotaan aktif di NU dengan pilihan kepada Anies–Muhaimin. Dalam model bivariat awalnya anggota aktif NU enggan memilih Anies ( $\beta = -0,365$ ; OR  $\approx 0,69$ ). Namun setelah kontrol dimasukkan dalam model multivariat efek negative NU terhadap Anies menjadi hilang ( $\beta = 0,032$ ; OR  $\approx 1,03$ ). Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan awal anggota aktif NU untuk tidak memilih Anies–Muhaimin bukan disebabkan oleh keaktifan dalam NU itu sendiri, melainkan lebih karena faktor-faktor lain seperti karakteristik demografis atau evaluasi politik yang berkorelasi dengan keanggotaan tersebut.

**Tabel 5:** Regresi Efek Keanggotaan Aktif di NU terhadap Pilihan Presiden dan Partai 2024

Anggota Aktif NU	Model Bivariat	Model Multivariat
Anies - Muhaimin	-0.365 ***	0.032
Prabowo - Gibran	-0.155 *	-0.292 ***
Ganjar - Mahfud	0.635 ***	0.339 ***
PKB	0.762 ***	0.707 ***
Gerindra	-0.401 ***	-0.337 ***
PDIP	0.421 ***	0.127
Golkar	0.347 ***	0.417 ***
NasDem	-0.241	-0.145
PKS	-1.315 ***	-1.119 ***
PAN	-0.157	-0.169
Demokrat	-0.754 ***	-0.632 ***
PPP	0.413 *	0.363

Sebaliknya, untuk pasangan Prabowo–Gibran, keanggotaan aktif NU menunjukkan efek negatif yang justru menguat setelah kontrol dimasukkan. Dalam model multivariat, koefisien sebesar  $-0,292$  (OR  $\approx 0,75$ ) mengindikasikan bahwa anggota aktif NU memiliki sekitar 25% peluang lebih rendah untuk memilih Prabowo–Gibran dibandingkan responden yang tidak aktif dalam NU. Temuan ini mengisyaratkan adanya resistensi organisasional di kalangan aktivis NU terhadap pasangan ini, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh faktor demografis maupun approval terhadap presiden. Dengan kata lain, dukungan elite PBNU terhadap Prabowo-Gibran tidak

mempengaruhi pilihan aktivis NU, namun berdampak positif kepada warga Nahdliyin secara umum.

Namun, untuk pasangan Ganjar–Mahfud, keanggotaan aktif NU berasosiasi positif dan konsisten. Dalam model multivariat, koefisien sebesar 0,339 ( $OR \approx 1,40$ ) menunjukkan bahwa anggota aktif NU sekitar 40% lebih mungkin memilih Ganjar–Mahfud dibandingkan non-anggota aktif. Temuan ini menegaskan bahwa pasangan Ganjar–Mahfud merupakan opsi yang paling kompatibel secara organisasional dengan basis aktif NU.

Dampak keanggotaan aktif NU terlihat paling kuat dan konsisten dalam pilihan partai politik. Efek paling menonjol ditemukan pada PKB, di mana koefisien multivariat sebesar 0,707 ( $OR \approx 2,03$ ) menunjukkan bahwa anggota aktif NU memiliki peluang sekitar dua kali lipat untuk memilih PKB dibandingkan responden lainnya. Temuan ini menegaskan efektivitas jaringan organisasional NU dalam mengonsolidasikan dukungan elektoral terhadap PKB.

Menariknya, keanggotaan aktif NU juga secara signifikan meningkatkan peluang memilih Golkar ( $\beta = 0,417$ ;  $OR \approx 1,52$ ). Anggota aktif NU sekitar 52% lebih mungkin memilih Golkar, menunjukkan bahwa partai ini berhasil menembus jaringan NU—kemungkinan melalui figur elite lokal, pola koalisi, atau hubungan pragmatis di tingkat daerah. Untuk PPP, keanggotaan aktif NU tetap memberikan efek positif yang signifikan ( $\beta = 0,363$ ;  $OR \approx 1,44$ ). Meskipun PPP melemah secara nasional, partai ini masih mempertahankan ceruk dukungan di kalangan aktivis NU tertentu. Sebaliknya, untuk PDIP, efek keanggotaan aktif NU tidak lagi signifikan setelah kontrol dimasukkan ( $OR \approx 1,14$ ), menunjukkan bahwa relasi NU–PDIP bersifat lebih longgar dan tidak terkonsolidasi secara organisasional.

Keanggotaan aktif NU secara konsisten menurunkan peluang memilih sejumlah partai lain terutama PKS, Gerindra, dan Demokrat. Efek paling kuat ditemukan pada PKS ( $\beta = -1,119$ ;  $OR \approx 0,33$ ), yang berarti anggota aktif NU memiliki sekitar 67% peluang lebih rendah untuk memilih partai tersebut. Hal ini menegaskan adanya jarak ideologis dan organisasional yang tajam antara NU dan PKS. Penurunan peluang juga terlihat pada Gerindra ( $OR \approx 0,71$ ) dan Demokrat ( $OR \approx 0,53$ ). Sementara itu, NasDem dan PAN tidak menunjukkan efek yang signifikan, mengindikasikan hubungan yang lebih cair dan pragmatis dengan jaringan NU.

Jika dibandingkan dengan variabel “Merasa NU”, hasil ini menunjukkan bahwa keanggotaan aktif NU memiliki efek yang lebih kuat, konsisten, dan terarah. Efek keanggotaan aktif cenderung bertahan dalam model multivariat, sementara efek kedekatan kultural sering kali melemah atau hilang setelah kontrol dimasukkan. Temuan ini menegaskan bahwa NU berfungsi bukan sekadar sebagai identitas simbolik, melainkan sebagai

jaringan sosial-politik yang terorganisasi, dengan konsekuensi elektoral yang nyata.

### **Pembahasan: Dari Identitas Kultural ke Jaringan Organisasional NU**

Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa pengaruh NU terhadap perilaku memilih dalam Pemilu 2024 tidak bersifat tunggal atau monolitik, melainkan bergantung pada bentuk keterikatan individu dengan NU. Perbedaan antara kedekatan kultural (“Merasa NU”) dan keanggotaan aktif dalam NU terbukti krusial dalam menjelaskan variasi pilihan politik, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan partai.

*Pertama*, kedekatan kultural dengan NU masih memiliki signifikansi elektoral, tetapi sifatnya selektif dan terbatas. Analisis regresi menunjukkan bahwa warga yang merasa dekat dengan NU cenderung lebih mendukung PKB dan PPP, serta—dalam derajat yang lebih moderat—PDIP, sambil secara konsisten menjauhi partai-partai seperti PKS, NasDem, PAN, dan Demokrat. Pola ini sejalan dengan argumen klasik politik aliran, yang menekankan peran milieu sosial-keagamaan dalam membentuk preferensi politik jangka panjang (Geertz, 1960; Ufen, 2006). Namun, temuan ini juga menunjukkan bahwa efek aliran tersebut tidak lagi deterministik. Dalam model multivariat, pengaruh elektoral dari variabel kedekatan kultural NU melemah atau bahkan hilang setelah mengontrol evaluasi politik dan faktor demografis, khususnya *approval* terhadap Presiden Jokowi. Hal ini konsisten dengan literatur dealiranisasi yang menunjukkan melemahnya ikatan identitas sosial terhadap pilihan elektoral di era pemilu langsung dan personalisasi politik (Dalton, 2004; Liddle dan Mujani, 2007).

Dalam Pilpres 2024, kedekatan kultural NU berasosiasi positif dengan dukungan terhadap Ganjar–Mahfud dan negatif terhadap Anies–Muhaimin, tetapi tidak menunjukkan hubungan yang konsisten dengan Prabowo–Gibran. Pola ini mengindikasikan bahwa identitas NU tidak bekerja sebagai kompas elektoral tunggal, melainkan sebagai predisposisi yang mudah dipengaruhi oleh konteks politik dan figur kandidat. Dengan kata lain, warga NU yang tidak terikat secara organisasional cenderung bersikap lebih cair dan responsif terhadap dinamika elite dan koalisi.

*Kedua*, dan yang lebih menentukan, keanggotaan aktif dalam NU menunjukkan efek yang jauh lebih kuat, konsisten, dan terarah. Individu yang aktif dalam NU atau badan otonomnya memiliki probabilitas yang secara signifikan lebih tinggi untuk memilih PKB dan PPP, serta menunjukkan kecenderungan yang jelas mendukung Ganjar–Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebaliknya, mereka secara konsisten menjauhi PKS, Gerindra, dan Partai Demokrat, serta menunjukkan resistensi terhadap Prabowo–Gibran. Efek ini

tetap signifikan bahkan setelah seluruh kontrol demografis dan politik dimasukkan ke dalam model.

Temuan ini menegaskan pentingnya jaringan organisasi dalam politik elektoral Nahdliyin. Literatur menunjukkan bahwa ketika identitas keagamaan dilembagakan melalui organisasi, pengaruh elite—terutama kiai dan tokoh NU—menjadi lebih efektif dalam membingkai pilihan politik dan mengarahkan perilaku memilih (Zaller, 1992; Kalyvas, 1996). Di sinilah kompleksitas terjadi: berhubung NU bukanlah organisasi politik dan secara formal menegaskan sikap non-partisan sejak “kembali ke khittah”, maka “efek NU” lebih sering bekerja melalui isyarat elite, jaringan kiai, pengurus organisasi, dan tokoh pesantren yang terfragmentasi secara elektoral. Keanggotaan aktif memang meningkatkan eksposur terhadap sinyal elite, diskursus internal organisasi, serta pertimbangan strategis yang berkembang di dalam jaringan NU, namun arahan elite tersebut tidak tunggal. Ketika elite NU terfragmentasi atau ambigu seperti pada Pilpres 2024 lalu preferensi pemilih NU menjadi sangat terbelah. Namun mobilisasi politik berbasis NU bisa efektif jika jaringan organisasi diaktifkan dan elite NU memberikan sinyal yang relatif konsisten kepada warganya. Hal ini terjadi pada Pilpres 2019 ketika Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin menjadi cawapres Jokowi: NU struktural dan kultural bersatu padu memenangkan paslon ini, sehingga Jokowi-Ma’ruf unggul telak di basis-basis NU seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Studi ini membantu menjembatani perdebatan antara pendekatan aliran dan dealiranisasi (*dealignment*) dalam menjelaskan perilaku warga Nahdliyin. Di satu sisi, studi ini menolak klaim bahwa politik aliran telah sepenuhnya mati seperti ditahbiskan kubu *dealignment*. Namun di sisi lain, temuan ini juga menunjukkan bahwa NU tidak lagi beroperasi sebagai blok pemilih otomatis dan permanen. Pengaruh NU kini bersifat kondisional, tersegmentasi, dan sangat bergantung pada aktivasi dan konsistensi elite dan organisasi, yang sejalan dengan argumen tentang transformasi hubungan antara identitas sosial dan perilaku memilih dalam demokrasi elektoral modern (Dalton, 2004).

Dalam konteks Pilpres 2024, perbedaan ini juga menjelaskan mengapa klaim “suara NU” sering kali bersifat problematis dan terfragmentasi. Kandidat presiden atau partai politik yang hanya mengandalkan simbol NU atau identitas keagamaan tanpa dukungan jaringan organisasional yang nyata cenderung gagal mengonsolidasikan dukungan. Sebaliknya, keberhasilan Ganjar-Mahfud dalam menarik dukungan dari aktivis NU menunjukkan pentingnya kesesuaian simbolik dan historis, kedekatan elite, dan konfigurasi koalisi dalam mengaktifkan jaringan NU secara elektoral.

Masalahnya adalah aktivis NU secara statistik jauh lebih sedikit dibanding jumlah warga yang memiliki kedekatan dengan NU. Mengandalkan dukungan elektoral semata kepada para aktivis NU sama sekali tidak cukup untuk memenangkan pilpres. Itu yang terjadi dalam kasus Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. Semakin dekat dengan kalender pilpres pesona Ganjar di kalangan NU menurun, dan pada saat yang sama ia gagal menarik dukungan dari warga non-NU.

## Simpulan

Studi ini menunjukkan bahwa warga Nahdliyin bukanlah blok pemilih yang monolitik dan tidak dapat dipahami semata-mata melalui klaim identitas keagamaan. Kedekatan kultural dengan NU saja terbukti tidak cukup untuk menjelaskan perilaku memilih dalam Pemilu 2024. Sebaliknya, temuan utama studi ini menegaskan bahwa keaktifan organisasional dan keterhubungan dalam jaringan NU memainkan peran yang jauh lebih menentukan dalam membentuk preferensi elektoral, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan partai politik. Namun, secara statistik, pemilih yang aktif dalam NU jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan warga Muslim yang hanya merasa dekat secara kultural dengan NU. Ketimpangan inilah yang menjadi kunci untuk memahami mengapa “suara NU” sering kali tampak terfragmentasi dan sulit dikonsolidasikan secara elektoral.

Secara teoretis, temuan ini membantu mencari titik temu antara perdebatan klasik antara pendekatan politik aliran dan *dealignment*. Studi ini menolak klaim ekstrem bahwa politik aliran telah sepenuhnya mati, karena NU tetap terbukti relevan dalam membentuk pilihan partai dan—dalam kondisi tertentu—pilihan presiden. Namun, pada saat yang sama, studi ini juga menegaskan bahwa NU tidak lagi berfungsi sebagai determinan otomatis perilaku memilih. Pengaruh NU kini bersifat kondisional, selektif, dan berlapis, bekerja terutama melalui jaringan organisasional dan isyarat elite (*elite cues*), bukan semata-mata melalui identitas simbolik. Dengan demikian, NU lebih tepat dipahami sebagai jaringan sosial-politik ketimbang sebagai “blok suara” yang homogen.

Dalam konteks Pilpres 2024, temuan ini juga menjelaskan paradoks utama politik Nahdliyin: meskipun Ganjar–Mahfud relatif kompatibel secara simbolik dan organisasional dengan basis aktivis NU, pasangan ini gagal mengonversi dukungan kultural warga NU yang jauh lebih besar menjadi kemenangan elektoral. Sebaliknya, Prabowo–Gibran gagal memenangkan kelompok aktivis NU, paslon ini berhasil menarik dukungan luas dari warga yang memiliki kedekatan kultural dengan NU yang secara statistik jumlahnya lebih besar, terutama melalui efek kuat Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi dapat melampaui afiliasi keagamaan, terutama

ketika jaringan organisasional tidak teraktivasi secara serempak dan konsisten.

Studi ini membuka sejumlah agenda penting untuk riset mendatang. *Pertama*, penelitian selanjutnya perlu menggali mekanisme mikro bagaimana isyarat elite NU diterjemahkan (atau gagal diterjemahkan) ke dalam perilaku memilih di tingkat akar rumput. Pendekatan *mixed-methods* yang mengombinasikan survei panel, metode eksperimen, dan wawancara mendalam dengan pengurus NU di tingkat lokal akan sangat membantu memperjelas proses transmisi pengaruh ini. Kedua, riset ke depan perlu menelusuri variasi regional efek NU, terutama di luar basis tradisional seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk memahami bagaimana NU beroperasi sebagai identitas simbolik versus jaringan organisasional dalam konteks sosial yang berbeda. *Ketiga*, studi komparatif lintas pemilu juga diperlukan untuk menilai apakah pola yang ditemukan pada Pemilu 2024 bersifat kontingen atau mencerminkan transformasi jangka panjang politik Nahdliyin di era personalisasi dan presidensialisasi politik.

Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa memahami politik NU di Indonesia kontemporer menuntut pergeseran analitis: dari fokus pada identitas keagamaan yang statis menuju analisis jaringan, aktor, dan konteks institusional yang dinamis. Upaya partai politik atau kandidat presiden untuk mengklaim “suara NU” secara otomatis tidak hanya problematis secara empiris, tetapi juga berisiko menyesatkan secara strategis. Yang jauh lebih menentukan adalah siapa yang mampu mengaktivasi jaringan NU, melalui elite mana, dan dalam konteks politik seperti apa—sebuah pertanyaan yang akan tetap relevan dalam pemilu-pemilu Indonesia ke depan.

## Referensi

- Bush, Robin. 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Dalton, Russell J. 2004. *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Fossati, Diego. 2019. “The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kalyvas, Stathis N. 1996. *The Rise of Christian Democracy in Europe*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Liddle, R. William, dan Saiful Mujani. 2007. *Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*. *Comparative Political Studies* 40 (7): 832–857.
- Mietzner, Marcus, dan Burhanuddin Muhtadi. 2018. "The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 40 (1): 58–84.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2019. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pascareformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Muhtadi, Burhanuddin, dan Kennedy Muslim. 2024. "Assessing Prabowo-Gibran's Victory: An Exit-poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election," *ISEAS Perspective*, 32  
<https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-32-assessing-prabowo-gibrans-victory-an-exit-poll-aftermath-analysis-of-the-2024-presidential-election-by-burhanuddin-muhtadi-and-kennedy-muslim/>
- Muhtadi, Burhanuddin. 2024. "Collective Memory and Electoral Politics in Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 43 (1): 1–22.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2025. "The 2024 Presidential Election: Reviewing Jokowi's Effect on Prabowo's Landslide Victory." In *Southeast Asian Affairs 2025*, edited by Daljit Singh and Malcolm Cook. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Qodari, Mohammad. 2015. "Split-Ticket Voting in Indonesia's 2014 Election." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 34 (1): 23–48.

Ufen, Andreas. 2006. "Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and Philippine-Style Clientelism." *South East Asia Research* 14 (3): 305–335.

Zaller, John. 1992. *The Nature and Origins of Mass Opinion*. Cambridge: Cambridge University Press